

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Akhir

Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ke tataran kehidupan masyarakat yang lebih baik bukanlah merupakan fenomena baru. Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah merupakan usaha untuk mencapai masyarakat adil dan makmur di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, karena merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional. Pelaksanaan Pembangunan Nasional berupaya mengkaji pembangunan secara berkesinambungan dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sasaran - sasaran pembangunan ditujukan guna mendukung tercapainya tujuan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut diperlukan keterlibatan antara Pemerintah dan masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah mempunyai tugas masing-masing, baik lembaga teknis daerah dan dinas - dinas daerah serta Camat sebagai pimpinan di tingkat Kecamatan bertugas menyusun rancangan

perencanaan yang berorientasi kepada pandangan teknis sektoral sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan di tingkat Kecamatan, maka upaya Camat dalam membangkitkan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Camat sebagai kepala pemerintahan di Kecamatan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan segala tugas pemerintahan dan pembangunan yang dilimpahkan oleh Pemerintah di atasnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan juga menjelaskan bahwa Camat mempunyai tugas umum Pemerintahan yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan tugas itu, Camat mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan pada forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan. Kesulitan banyak terjadi dalam memperoleh partisipasi masyarakat, dimana di dalamnya terdapat beraneka ragam sikap yang berbeda-beda. Fenomena ini ditunjukkan dengan adanya sikap apatis sebagian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang peduli terhadap kegiatan pembangunan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah akan secara langsung berpengaruh pada pelaksanaan

pembangunan suatu daerah. Pelaksanaan pembangunan yang dulunya *Top Down Planning* dianggap tidak sesuai lagi dengan paradigma pemerintahan yang ada sekarang. Sistem ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya karena yang berwenang untuk mengatur semua program adalah Pemerintah Pusat, sedangkan daerah hanya berhak menjalankan program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa, misalnya pada pembangunan gedung sekolah. Partisipasi masyarakat hanya sebatas menyediakan sebidang tanah, bahkan ada sebagian masyarakat yang meminta ganti rugi atas tanah mereka yang digunakan untuk membangun fasilitas umum. Padahal proyek tersebut dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam pembangunan tersebut masyarakat hanya melihat dan menonton saja, begitu pembangunan selesai masyarakat akan gembira dan menikmati hasil pembangunan tersebut. Namun, setelah itu masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk menjaga dan merawat hasil pembangunan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut tidak ada partisipasi dari masyarakat, sehingga masyarakat menganggap bahwa pembangunan itu hanya dilakukan oleh pemerintah saja, sehingga pemerintah jugalah yang harus menjaga dan merawat hasil pembangunan tersebut.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan pasal 1 ayat (3)

menyatakan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Partisipasi dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengganti dalam pembangunan sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah dalam pembangunan. Lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2012:82) menyimpulkan bahwa “partisipasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai”.

Adanya partisipasi dalam masyarakat, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga mampu menjadi subjek pembangunan. Dengan demikian masyarakat akan menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan. Pembangunan yang bersifat sentralistis hanya akan menciptakan penumpukan administrasi dan pengambilan keputusan pembangunan di pusat serta menghambat penyelesaian masalah pembangunan daerah secara cepat dan tepat. Banyak program-program pembangunan nasional yang tidak dapat

terlaksana dengan baik karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerah. Akibatnya dukungan masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan kurang menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas. Untuk itu, dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat. Besarnya peranan partisipasi masyarakat dalam menentukan keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri karena pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat tidak dapat dikatakan berhasil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari masyarakat pada wilayah dimana pembangunan tersebut dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat beraneka ragam tergantung dari kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat di suatu wilayah itu sendiri.

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Pasar Manna tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat memegang peranan yang besar dalam pelaksanaan pembangunan, terutama di bidang pembangunan fisik. Partisipasi masyarakat dapat berwujud tenaga, uang, pikiran ataupun keahlian/kemahiran yang berguna bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang paling sering terlihat dalam

setiap pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pasar Manna adalah partisipasi dalam bentuk pikiran yang tidak lain adalah merupakan bentuk keinginan dari masyarakat. Intinya adalah partisipasi harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Pasar Manna, namun sangat disayangkan partisipasi yang diharapkan dari masyarakat sangat sulit terwujud.

Partisipasi masyarakat di Kecamatan Pasar Manna dapat dilakukan dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan hasil pembangunan serta dalam penilaian hasil pembangunan hubungannya dengan kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar. Dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat hanya terjadi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Khusus untuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan dinilai sangat terlambat karena masyarakat akan diminta pemikirannya hanya jika pembangunan telah dilaksanakan. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan hanya terjadi dalam skala kecil dan itu pun harus ada imbalan yang sesuai dengan permintaan masyarakat. Ini merupakan salah satu penyebab keterlambatan pembangunan yang terjadi di Kecamatan Pasar Manna.

Masyarakat juga sudah terbiasa dengan bantuan dana dari Pemerintah Daerah. Kondisi seperti ini membuat masyarakat berpendapat bahwa mereka tidak perlu bekerja, apalagi berpartisipasi dalam pembangunan yang penghasilannya sangat kecil. Pola pikir masyarakat di

Kecamatan Pasar Manna dapat dikatakan sudah materialistik, karena masyarakat selalu meminta upah atas setiap pekerjaan yang mereka lakukan, walaupun pekerjaan tersebut memiliki manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan khususnya di bidang pembangunan fisik di Kecamatan Pasar Manna baik itu keterlibatan masyarakat sebagai kesatuan atau yang disebut partisipasi kelompok maupun individual dalam kegiatan kelompok atau yang disebut partisipasi individu.

Pembangunan fisik yang dilaksanakan di Kecamatan Pasar Manna pada tahun 2012 yang lalu adalah perbaikan jalan. Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan yaitu dalam perbaikan jalan ini kurang adanya harmonisasi Pemerintah dengan masyarakat sehingga menyebabkan saling tunggu menunggu dan akhirnya perbaikan jalan tersebut terbengkalai dan tidak terselesaikan. Ini jelas merugikan masyarakat karena masyarakat yang merasakan dampaknya.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN FISIK DI KECAMATAN PASAR MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN”**

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah di Lokasi Magang

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang laporan akhir di atas, maka dalam penulisan rancangan laporan akhir ini penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang pada umumnya terjadi pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan fisik di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Penulis mengidentifikasi sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam pelaksanaan pembangunan
2. Belum optimalnya sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga pembangunan yang dilaksanakan belum optimal
5. Kurangnya harmonisasi antara masyarakat dengan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan
6. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
7. Masyarakat masih terlalu berharap terhadap bantuan Pemerintah

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk mempertegas dalam menganalisa permasalahan di atas, maka masalah perlu dipersempit dengan melakukan pembatasan masalah. Sehingga penulis hanya akan membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan fisik khususnya partisipasi masyarakat dalam pemberian bantuan tenaga, pikiran, keahlian/kemahiran maupun harta benda yang dilaksanakan di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.2.3 Rumusan Masalah

Mengamati permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan fisik di Kecamatan Pasar Manna?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan fisik di Kecamatan Pasar Manna?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

1.3 Maksud dan Tujuan Magang

1.3.1 Maksud Magang

Pelaksanaan magang ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan fisik, menemukan faktor yang mendorong dan menghambat serta menemukan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pembangunan fisik di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.3.2 Tujuan Magang

Magang ini dilakukan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan fisik di Kecamatan Pasar Manna
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Kecamatan Pasar Manna
3. Untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan fisik di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

1.4 Kegunaan Magang

1.4.1 Kegunaan Praktis untuk Lokasi Magang

Hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.4.2 Kegunaan Praktis untuk Lembaga

Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) guna menambah wawasan penulis yang akan datang.